

MENGURAI BENANG KUSUT GOLONGAN PUTIH

Oleh : Putu Agustana*¹

Abstraksi

Istilah Golput (Golongan Putih) pertama kali muncul muncul pada Pemilihan Umum Tahun 1971. Golput adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak memberikan suaranya dalam Pemilu di Indonesia. Selanjutnya fenomena Golput itu berkembang menjadi suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam Pemilu, karena sikap politik memprotes, atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Fenomena Golput juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Secara akademis dapat disebutkan bahwa fenomena golput juga mudah muncul, karena calon pemilih datang ke kotak suara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, adalah *hak* dan bukan *kewajiban*. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi politik dalam pemilihan umum, memang bersifat sukarela (*voluntary*)

Kata Kunci: Golput, Pemilu, Budaya Politik, Hak dan Kewajiban

*¹ Dosen FISIP Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Hantu abadi yang lahir dalam setiap kontestasi demokrasi adalah golongan putih (golput). Tidak terkecuali di pemilu 2019 ini, golput menjadikan kontestan dan penyelenggara pemilu diselimuti rasa galau menghadapi pemilu. Kontestan pemilu dirugikan terkait pengurangan potensi suara, sedangkan penyelenggara pemilu dirugikan terkait stigma negatif menyangkut kinerja lembaganya.

Orang-orang, yang tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum di Indonesia, dikenal dengan sebutan "golongan putih" atau *golput*. Istilah *golput* itu pertama kali muncul dalam pemilihan umum tahun 1971, sebagai bentuk *gerakan moral* memprotes rezim Soeharto yang sedang berkuasa di Indonesia. Awalnya sejumlah tokoh dari kalangan intelektual dan mahasiswa sebagai generasi muda menggalang dukungan dengan melakukan "kampanye" agar tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum, dengan memperkenalkan tanda gambar segi lima yang menggunakan dasar *warna*

putih. Tanda gambar itu ditempelkan di tempat-tempat yang ramai. Tentu saja kampanye golput itu di larang oleh Pemerintah Orde Baru.

Selanjutnya istilah golput itu berkembang menjadi semua suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum, karena sikap politik memprotes, atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Salah satu alasan orang tidak datang ke bilik suara ialah karena tidak mengenal satu pun kandidat atau calon yang akan dipilih. Hal itu menunjukkan adanya kegagalan kampanye politik dan sosialisasi politik dalam pemilihan umum oleh para kandidat, juru kampanye atau partai politik.

Orang-orang yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum merupakan sebuah "tindakan politik" atau "perilaku politik". Hal itu dapat juga disebut sebagai salah satu bentuk partisipasi politik atau budaya politik rakyat. Di samping itu, orang-orang yang sengaja tidak berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang dikenal sebagai golput itu, menunjukkan bahwa kampanye sebagai agenda politik pemilihan umum tidak mampu memengaruhi calon pemilih.

2. Budaya Politik

Pada umumnya kehadiran golput dalam setiap pemilihan umum di Indonesia, memiliki ciri yang relatif sama, yaitu merupakan bentuk apatis dan kritis dikalangan calon pemilih serta sekaligus dapat merupakan bentuk protes kepada rezim yang berkuasa. Justru itu Anwar Arifin (2011) memasukkan juga golput ke dalam kelompok "partisipasi kegiatan protes" atau "partisipasi kritis". Sedang Charles Andrian—James Smith (2006) menyebutkan bahwa kelompok (golput) itu pada dasarnya sama dengan orang—orang yang ikut dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau melakukan boikot yang berkembang di berbagai negara demokrasi.

Fenomena golput, juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sikap seseorang untuk berpartisipasi apakah aktif, pasif, atau kritis dalam pemilihan umum tidak terlepas dari budaya politiknya. Dengan demikian, kapabilitas dan daya

tanggap seseorang atau kelompok terhadap suatu sistem politik ditunjukkan atau dicerminkan oleh budaya politik yang dianutnya.

Budaya politik tersebut sangat penting, karena mampu memengaruhi politik seseorang di dalam negara demokrasi, sehingga perlu dikembangkan nilai-nilai dan orientasi tertentu yang menopangnya seperti: moderat, toleransi, civilitas, efisiensi, kecerdasan dan partisipasi. Almond dan Verba (1963) memahami budaya politik berdasarkan tiga orientasi politik individu, yaitu: (1) orientasi kognisi, (2) orientasi afeksi, dan (3) orientasi evaluasi. Budaya politik itu kemudian memengaruhi kesadaran politik individu-individu untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi yang merupakan elemen dasar dalam demokrasi perwakilan, dimaksudkan keterlibatan semua warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Justru itu fenomena golput yang besar jumlahnya menjadi masalah dalam kualitas pemilihan umum dan demokrasi perwakilan, karena akan memperbesar terjadinya ketidaksambungan atau kesenjangan antara rakyat pemilih dengan wakil rakyat yang terpilih (*disconnect electoral*).

Terjadinya *disconnect electoral* tersebut dibuktikan di Indonesia oleh hasil survei yang dilakukan oleh Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesi;) tanggal 13 Januari - 7 Februari 2011 dengan metode *random sampling*. Formappi menemukan bahwa rakyat merasa tidak terwakili oleh anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Bahkan mayoritas responden tidak mengenal anggota parlemen yang menjadi wakilnya (*Kompas*, 22-3-2011). Terdapat 71% responden tidak mendukung partai politik tertentu, dan dari jumlah itu terdapat 93% yang tidak memilih (golput) dalam pemilihan umum tahun 2009. Dari sebanyak 14% responden yang mendukung partai politik tertentu, menyebut nama partai politik yang didukung, namun 72% tidak mengenal orang yang mewakilinya, dan bahkan 96% merasa tidak terwakili oleh anggota parlemen.

3. Penyebab Golput

Fenomena tersebut di atas sangat menarik, karena terputusnya relasi antara wakil dan terwakili (*disconnect electoral*) itu sekaligus melahirkan "ketidakpercayaan" (*distrust*) dari rakyat (pemilih) yang akan mendorong lahirnya sikap dan politik "kepala batu" untuk menjadi golput (tidak ikut dalam pemilihan umum) dan tidak mau terlibat dalam partisipasi politik lainnya. Kesenjangan elektoral (*disconnect electoral*) itu akan terus terjadi di Indonesia, karena baik wakil atau terwakili sama-sama dijangkiti oleh politik dan budaya politik *ignorance* atau bercorak apatis. Tak bisa dipungkiri bahwa pemilih yang melakukan golput itu termasuk kelompok politik yang apatis itu. Bahkan dewasa ini fenomena golput muncul kembali dalam bentuk '*defenders*' (Marijan, 2010: 132) atau penolakan terhadap kebijakan rezim yang berkuasa.

Secara akademis dapat disebutkan bahwa fenomena golput juga mudah muncul, karena calon pemilih datang ke kotak suara untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, adalah *hak* dan bukan kewajiban (*compulsory*). Sebagai *hak* tentu boleh digunakan, tetapi juga boleh tidak dimanfaatkan dalam pemilihan umum, sehingga berpartisipasi dalam pemberian suara, bersifat *pilihan* atau opsional (*optional*). Hal itu dapat juga berarti bahwa berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan masalah pribadi meskipun menyangkut urusan kenegaraan, yang dikenal sebagai *civic privatism* (Ackerman-Fishkin, 2003). Justru itu ketika seseorang memberikan suaranya dalam bilik suara secara bebas, langsung dan rahasia, maka sepenuhnya merupakan masalah pribadi.

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi politik dalam pemilihan umum, memang bersifat sukarela (*voluntary*). Sifat sukarela itu mengharuskan para politikus atau kandidat harus mampu "membujuk" rakyat melalui kampanye yang informatif, edukatif, dan persuasif secara efektif. Para politikus selaku komunikator politik wajib membangun citra dan membentuk opini publik yang positif baginya agar rakyat sukarela datang ke bilik-bilik suara dan memberikan suaranya kepada kandidat atau partai politiknya. Demikian juga kesenjangan elektoral (*disconnect electoral*) harus

dihapuskan dengan menjalin komunikasi langsung antara politikus yang mewakili dan rakyat yang diwakili.

Sejarah pemilihan umum di Indonesia, menunjukkan bahwa jumlah golput itu menurut statistik, masih rendah dibanding dengan negara-negara lain. Artinya tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum (*turn out*) di Indonesia masih relatif tinggi, karena rata-rata masih di atas 60%. Bahkan pada masa Orde Baru (pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) angka partisipasi politik dalam pemilihan umum mencapai hampir 90%. Persentase yang paling tinggi selama pemilu dilakukan tahun 1955-2009 adalah pemilihan umum tahun 1971 (93,66%), dan yang paling rendah adalah pemilihan umum tahun 2009 (61,78%). Hal itu menunjukkan bahwa jumlah golput yang terbanyak selama ini, terdapat dalam pemilihan umum tahun 2009 yaitu, 39,22%.

Ternyata jumlah golput dalam pemilihan umum pasca Orde Baru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah golput terjadi juga dalam pemilukada (pemilihan umum kepala daerah). Bahkan dalam beberapa pemilukada, justru golput menjadi pemenang, dalam arti jumlah suara golput lebih banyak dari semua kandidat. Demikian juga dalam pemilihan umum tahun 2009, golput tampil sebagai pemenang, karena dari 171.265.442 yang terdaftar sebagai 'pemilih tetap', hanya 121.288.366 yang menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut mencontreng. Sedang suara yang sah hanya 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah suara golput dapat menjadi 167.165.657 (49.677.076 + 17.488.581), jauh lebih besar dari suara Partai Demokrat yang memenangi pemilihan umum tahun 2009, yaitu 21.703.137 (20,85 %). Demikian juga dalam pemilihan umum tahun 2014, ternyata suara Golput (24, 89 % atau 60. 809. 764) juga lebih besar dari suara PDI Perjuangan (18, 95 % atau 23.681. 471) yang memenangi pemilu. Suara yang sah dalam pemilu 2014 adalah 124. 972. 491 dari 185. 882. 225 dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) (Arifin: 2015).

Adanya kecenderungan semakin meningkatnya angka golput itu, telah menimbulkan kekhawatiran karena kemungkinan dalam pemilu 2019 jumlah golput akan bertambah lagi. Hal itu sejalan dengan semakin meningkat "kekecewaan" (*disillusionment*) banyak kalangan terhadap "reformasi" dan demokrasi yang semakin jauh dari harapan. Kekhawatiran dan kekecewaan itu semakin merebak karena kedatangan warga negara ke bilik-bilik suara banyak sekali yang digerakkan (dimobilisasi) oleh kandidat melalui tim suksesnya, dengan cara melakukan intimidasi dan atau memberikan hadiah baju kaos, sarung, baju koko, sembako, dan bentuk lainnya atau uang transportasi. Hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk "politik uang" (*money politics*) yang terjadi terutama dalam "pasar gelap politik", sehingga sukar dibuktikan secara hukum.

Sejumlah pengamat, pakar atau akademisi menyimpulkan bahwa dalam pemilihan umum pada masa reformasi di Indonesia, telah berkembang pesat perilaku politik "transaksi materi" yang kemudian dikenal dengan sebutan, "politik transaksional". Hal itu menimbulkan dampak politik yang luas dan kompleks yang sekaligus sangat memperburuk *citra* demokrasi.

Hal tersebut terjadi karena kampanye politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga muncul "perilaku politik instan" dalam pemilihan umum. Perilaku politik instan dan transaksi politik dalam "pasar gelap politik" itu, kemudian melahirkan juga kesenjangan elektoral (*disconnect electoral*) karena bagi politikus urusan rakyat telah selesai setelah diberi "hadiah". Para pemilih juga berpandangan bahwa kalau kandidat nanti terpilih maka dia akan memperoleh kehormatan dan keuntungan material, sehingga pemilih juga pantas memperoleh keuntungan materi ketika memilih kandidat. Perilaku "politik transaksional" itu, telah membuat citra demokrasi semakin merosot dan bahkan mulai "dibenci" oleh para intelektual, ulama, tokoh agama dan kaum idealis lainnya. Para pendekar demokrasi harus berjuang keras, agar "politik transaksional" itu dihilangkan terutama dalam pemilihan umum.

4.Upaya Pencegahan Golput

Golput menjadi tantangan yang mesti ditekan demi peningkatan partisipasi melalui pendidikan politik, akomodasi reglasi dan perbaikan administrasi data. Pendekatan spesifik penting dibedakan sesuai akar golput di atas. Penekanan angka golput juga hendaknya bersifat prioritatif melalui pendidikan politik yang dapat dilakukan terhadap pelaku golput karena buta politik dan idealisme. Kalangan buta politik dapat dididik mengenai urgensi politik bagi pembangunan bangsa. Pemahaman juga penting ditanamkan bahwa semua penduduk berkepentingan terhadap politik karena semua urusan negara diselenggarakan melalui kebijakan politik. Kalangan ini dapat didorong untuk aktif memberikan aspirasi agar kepentingannya terakomodasi secara politis.

Agar "politik transaksional" tersebut dapat dihilangkan dan sekaligus mengurangi jumlah golput, maka diperlukan sosialisasi dan pendidikan politik maupun komunikasi politik yang intensif dan efektif, melalui pemasaran politik atau *public relations* politik dalam waktu yang panjang. Harus disadari bahwa dalam pencitraan politik yang sehat tak ada sesuatu yang instan atau karbitan, karena harus melalui proses yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, 1963, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Princeton : Princeton University Press.
- Andrain, Charles F dan James T. Smith, 2006, *Political Democracy, Trust, and Social Justice: A Comparative Overview* : Boston Northeastern University Press.
- Arifin, Anwar, 2011, *Komunikasi Politik-Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
-, 2015, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Puatoka Utama.
- Lupiyanto Ribut, *Golput dan Akselerasi Partisipatori Demokrasi* : Harian Bali Post, Sabtu 30 Maret 2019.
- Maksudi Beddy Iriawan, 2012, *Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada